



Media: Koran Tempo

Hari: Kamis

Tanggal: 26 November 2009

Halaman: B1

Warga Miskin di Kota Dijamin Asuransi Kesehatan

Program jaminan kesehatan kurang sosialisasi.

YOGYAKARTA — Semua warga miskin di Kota Yogyakarta yang belum dijamin kesehatannya akan mendapatkan jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). “Peraturan wali kota tentang Jamkesta dimungkinkan keluar minggu ini,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kusminatun kemarin.

Program itu telah diujicobakan di lima kecamatan di kota, yakni Wirobrajan, Tegalrejo, Pakualaman, Jetis, dan Umbul Harjo, sejak September hingga akhir Desember mendatang. Menurut dia, berdasarkan penelitian Universitas Gadjah

Mada, masih terdapat 43-47 persen warga rentan miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan mana pun.

Saat ini sudah ada program asuransi untuk penduduk miskin, yakni Jamkesmas (kebijakan pusat), Jamkesos (provinsi), Jamkesda (kota), dan Askes. Pembiayaan Jamkesta dilakukan melalui model pembayaran iuran bagi masyarakat mampu dan tanpa iuran bagi warga miskin.

Bagi warga mampu, besar iuran Rp 10 ribu tiap peserta per bulannya, sehingga peserta akan mendapatkan tanggungan biaya kesehatan sebesar Rp 15 juta per tahun. “Tapi selama uji coba, peserta hanya membayar Rp 5.000, karena ada subsidi premi dari APBD sebesar 50 persen atau Rp 5.000,” kata Kusminatun.

Sebelum ada uji coba Jamkesta, warga rentan miskin mengajukan surat keterangan tidak mampu berobat. Namun, untuk efektivitas percobaan Jamkesta, selama masa uji coba, lima kecamatan itu tak lagi memberlakukan surat keterangan bagi warga rentan miskin. Pemberlakuan surat itu akan dilakukan lagi pada awal 2010, sekaligus uji coba Jamkesta untuk sembilan kecamatan lainnya.

Hingga saat ini sudah ada 5.536 peserta yang mendaftar. Dari jumlah itu, 119 peserta telah mengajukan klaim pengobatan kesehatannya. Pemerintah kota telah mengajukan klaim atas program itu sebanyak Rp 269 juta.

Adapun peraturan daerah tentang Jamkesda ditargetkan akan disahkan tiga bulan mendatang.

“Perda Jamkesda merupakan inisiatif Dewan dan kami mendesak untuk diprioritaskan,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko.

Sementara itu, berdasarkan riset pada 2008-2009 oleh lembaga swadaya masyarakat Jangkep, yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan, sebanyak 20 persen penduduk Kota Yogyakarta telah ditangani skema jaminan kesehatan. Tapi hasil riset juga menunjukkan bahwa baru 29 persen warga yang paham atas program Jamkesda.

Padahal minat warga mengikuti Jamkesda mencapai 75 persen. “Artinya, kebijakan Jamkesda masih minim sosialisasi,” kata Koordinator Riset dan Advokasi LSM Jangkep Iranda Yudatama.

Kepada Yth. :
 Walikota Yogyakarta
 Wakil Walikota Yogyakarta
 Sekretaris Daerah
 Asisten
 dan Kepala Yth. :

Instansi

lanjut
 ditanggapi
 diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005